



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 2  
TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta perkembangan kondisi kekinian perlu dilakukan penggantian atas Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi Perjalanan Dinas dalam lingkungan masing-masing menurut sifat dan urgensinya;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari apabila memiliki kriteria/sifat Perjalanan Dinas sebagai berikut:
  - a. Mengikuti Pendidikan/Latihan atau;
  - b. Memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan dan/atau daerah tujuan atau;
  - c. Panggilan dari pihak penyelenggara kegiatan dengan jadwal kegiatan lebih dari 3 (tiga) hari;
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah lebih dari 3 (tiga) hari dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/ Wakil Walikota untuk :
  - a. Pejabat Negara;

- b. Pejabat eselon II;
  - c. Pejabat Pemerintah Pusat, Pegawai Negeri Sipil Pusat;
  - d. Camat;
  - e. Lurah;
  - f. Tenaga Akademisi/Tenaga Ahli/Konsultan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota; dan
  - g. Tokoh/Anggota Masyarakat.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah lebih dari 3 (tiga) hari dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah untuk :
- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mataram kecuali yang menjadi kewenangan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - b. Sopir berstatus pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (4) Dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (6) Pejabat yang berwenang dan/atau yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan berkenaan dengan Perjalanan Dinas.
- (7) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan dapat dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (7) dihapus sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
- a. Biaya angkutan dari daerah asal ke daerah tujuan;
  - b. Biaya pemetaan dan angkut jenazah;
  - c. Uang harian mencakup biaya makan/minum, lokal dan uang saku;
  - d. Uang Representasi;
  - e. Biaya Penginapan;
  - f. Biaya Transport (Taksi).
- (2) Masing-masing jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dibayarkan dalam satuan jumlah "LUMPSUM" harian sebelum perjalanan dimulai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IX Peraturan Walikota ini.
- (3) Biaya penginapan adalah biaya yang dibayarkan sesuai harga riil (*Real Cost*) dengan batas tertinggi sesuai Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (4) Transportasi (taksi) adalah biaya satuan taksi yang dibayarkan setiap dari tempat kedudukan/penginapan ke bandara dan sebaliknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

- (5) Biaya angkutan udara, darat dan laut disertai standar biaya angkut yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan dibayarkan sesuai harga riil (*Real Cost*).
  - (6) Biaya angkutan darat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
  - (7) Dihapus;
  - (8) Bagi Walikota/Wakil Walikota dapat diberikan fasilitas angkutan kendaraan kelas utama.
  - (9) Biaya Angkutan Udara dalam keadaan tertentu seperti *High Season* dan/atau *Force Majeure* maka dapat melebihi standar yang ditetapkan sepanjang dapat dibuktikan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah.
  - (10) Biaya pemetaan dan angkut jenazah diberikan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
  - (11) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
  - (12) Biaya penginapan bagi pendamping (ajudan) Walikota/Wakil Walikota dapat menggunakan tarif kamar standar pada hotel yang dipergunakan oleh Walikota/Wakil Walikota.
  - (13) Biaya penginapan bagi istri Walikota/Wakil Walikota pada saat mendampingi Walikota/Wakil Walikota dapat menggunakan tarif kamar hotel yang dipergunakan oleh Walikota/Wakil Walikota.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pengelompokan tingkat perjalanan dinas digolongkan meliputi:
  - a. Tingkat A, untuk Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD;
  - b. Tingkat B, untuk Sekretaris Daerah/Anggota DPRD;
  - c. Tingkat C, untuk Pejabat Eselon II;
  - d. Tingkat D, untuk Pejabat Eselon III atau Eselon IV/PNS/Jabatan Fungsional/Tokoh Masyarakat; Pegawai Tidak Tetap/Anggota Masyarakat dan lain-lain selain yang ditentukan dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas.
- (2) Keikutsertaan Non PNS/Anggota Masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama untuk melakukan perjalanan dinas melekat pada kegiatan Perangkat Daerah.

- (3) Keikutsertaan Non PNS/Anggota Masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Perangkat Daerah terkait atau pada Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram.
  - (4) Dalam hal istri Walikota dan istri Wakil Walikota yang melaksanakan tugas dengan Perangkat Daerah terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah maka penggolongan dan tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas disamakan dengan tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (5) Penggolongan dan tingkatan dalam melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS dengan jabatan fungsional sesuai dengan golongannya.
  - (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri Walikota/Wakil Walikota mengikutsertakan pendamping (ajudan) disetarakan dengan tingkat D.
4. Ketentuan Pasal 14 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A) sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS Golongan IV dan III sedangkan bagi PNS Golongan I dan II tidak diperkenankan mengikuti Perjalanan Dinas Luar Negeri.
  - (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan Ajudan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.
  - (3) Satuan biaya uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran IV diubah sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan dalam Lampiran VII dihapus.

Pasal II  
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 19 Januari 2019

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 19 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 NOMOR 6 / 2019  
 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(Dalam US\$)

| NO | NEGARA                 | SATUAN | GOLONGAN |        |       |        |
|----|------------------------|--------|----------|--------|-------|--------|
|    |                        |        | GOL.A    | GOL. B | GOL.C | GOL. D |
| 1  | 2                      | 3      | 4        | 5      | 6     | 7      |
|    | <b>AMERIKA UTARA</b>   |        |          |        |       |        |
| 1  | Amerika Serikat        | OH     | 578      | 513    | 440   | 382    |
| 2  | Kanada                 | OH     | 447      | 404    | 368   | 307    |
|    | <b>AMERIKA SELATAN</b> |        |          |        |       |        |
| 3  | Argentina              | OH     | 534      | 402    | 351   | 349    |
| 4  | Venezuela              | OH     | 557      | 388    | 344   | 343    |
| 5  | Brazil                 | OH     | 436      | 341    | 291   | 241    |
| 6  | Chile                  | OH     | 415      | 316    | 270   | 222    |
| 7  | Columbia               | OH     | 436      | 323    | 276   | 254    |
| 8  | Peru                   | OH     | 459      | 347    | 320   | 276    |
| 9  | Suriname               | OH     | 398      | 295    | 252   | 207    |
| 10 | Ekuador                | OH     | 385      | 273    | 242   | 241    |
|    | <b>AMERIKA TENGAH</b>  |        |          |        |       |        |
| 11 | Mexico                 | OH     | 493      | 366    | 324   | 323    |
| 12 | Kuba                   | OH     | 406      | 305    | 261   | 221    |
| 13 | Panama                 | OH     | 414      | 342    | 306   | 271    |
|    | <b>EROPA BARAT</b>     |        |          |        |       |        |
| 14 | Austria                | OH     | 504      | 453    | 318   | 317    |
| 15 | Belgia                 | OH     | 466      | 419    | 282   | 281    |
| 16 | Perancis               | OH     | 512      | 464    | 382   | 381    |
| 17 | Jerman                 | OH     | 447      | 415    | 285   | 285    |
| 18 | Belanda                | OH     | 463      | 416    | 272   | 271    |
| 19 | Swiss                  | OH     | 636      | 570    | 403   | 401    |
|    | <b>EROPA UTARA</b>     |        |          |        |       |        |
| 20 | Denmark                | OH     | 567      | 491    | 343   | 301    |
| 21 | Finlandia              | OH     | 453      | 409    | 354   | 313    |
| 22 | Norwegia               | OH     | 621      | 559    | 289   | 386    |
| 23 | Swedia                 | OH     | 466      | 436    | 342   | 341    |
| 24 | Inggris                | OH     | 792      | 774    | 583   | 582    |
|    | <b>EROPA SELATAN</b>   |        |          |        |       |        |
| 25 | Bosnia Herzegovina     | OH     | 456      | 420    | 334   | 333    |
| 26 | Kroasia                | OH     | 555      | 506    | 406   | 405    |
| 27 | Spanyol                | OH     | 457      | 413    | 287   | 286    |
| 28 | Yunani                 | OH     | 422      | 379    | 242   | 241    |
| 29 | Italia                 | OH     | 702      | 637    | 446   | 427    |
| 30 | Portugal               | OH     | 425      | 382    | 242   | 241    |
| 31 | Serbia                 | OH     | 417      | 375    | 326   | 288    |
|    | <b>EROPA TIMUR</b>     |        |          |        |       |        |
| 32 | Bulgaria               | OH     | 406      | 367    | 320   | 284    |
| 33 | Czech                  | OH     | 618      | 526    | 447   | 367    |
| 34 | Hongaria               | OH     | 485      | 438    | 390   | 345    |
| 35 | Polandia               | OH     | 461      | 415    | 360   | 319    |
| 36 | Rumania                | OH     | 416      | 381    | 313   | 277    |
| 37 | Rusia                  | OH     | 556      | 512    | 407   | 406    |
| 38 | Slovakia               | OH     | 437      | 394    | 341   | 303    |
| 39 | Ukraina                | OH     | 485      | 436    | 375   | 331    |

|    |                       |    |     |     |     |     |
|----|-----------------------|----|-----|-----|-----|-----|
|    | <b>AFRIKA BARAT</b>   |    |     |     |     |     |
| 40 | Nigeria               | OH | 361 | 313 | 292 | 291 |
| 41 | Senagal               | CH | 384 | 317 | 237 | 231 |
|    |                       |    |     |     |     |     |
|    | <b>AFRIKA TIMUR</b>   |    |     |     |     |     |
| 42 | Ethiopia              | OH | 358 | 295 | 221 | 193 |
| 43 | Kenya                 | OH | 384 | 317 | 237 | 225 |
| 44 | Madagaskar            | OH | 296 | 244 | 182 | 181 |
| 45 | Tanzania              | OH | 350 | 290 | 244 | 218 |
| 46 | Zimbabwe              | OH | 328 | 281 | 248 | 247 |
| 47 | Mozambique            | OH | 399 | 329 | 265 | 264 |
|    |                       |    |     |     |     |     |
|    | <b>AFRIKA SELATAN</b> |    |     |     |     |     |
| 48 | Namibia               | OH | 405 | 334 | 268 | 233 |
| 49 | Afrika selatan        | OH | 380 | 313 | 253 | 251 |
|    |                       |    |     |     |     |     |
|    | <b>AFRIKA UTARA</b>   |    |     |     |     |     |
| 50 | Aljazair              | OH | 342 | 308 | 287 | 286 |
| 51 | Mesir                 | OH | 409 | 303 | 235 | 211 |
| 52 | Maroko                | OH | 304 | 251 | 192 | 191 |
| 53 | Tunisia               | OH | 293 | 241 | 187 | 186 |
| 54 | Sudan                 | OH | 342 | 282 | 210 | 184 |
| 55 | Libya                 | OH | 308 | 254 | 189 | 165 |
|    |                       |    |     |     |     |     |
|    | <b>ASIA BARAT</b>     |    |     |     |     |     |
| 56 | Azerbaijan            | OH | 498 | 459 | 365 | 364 |
| 57 | Bahrain               | OH | 416 | 294 | 228 | 214 |
| 58 | Irak                  | OH | 447 | 325 | 253 | 231 |
| 59 | Yordania              | OH | 406 | 292 | 236 | 225 |
| 60 | Kuwait                | OH | 456 | 325 | 296 | 294 |
| 61 | Libanon               | OH | 357 | 267 | 207 | 186 |
| 62 | Qatar                 | OH | 386 | 276 | 215 | 196 |
| 63 | Suriah                | OH | 358 | 257 | 200 | 196 |
| 64 | Turki                 | OH | 456 | 364 | 283 | 253 |
| 65 | Uni Arab Emirat       | OH | 459 | 323 | 302 | 301 |
| 66 | Yaman                 | OH | 353 | 241 | 197 | 196 |
| 67 | Saudi Arabia          | OH | 450 | 331 | 269 | 251 |
| 68 | Kesultanan Oman       | OH | 413 | 292 | 247 | 249 |
|    |                       |    |     |     |     |     |
|    | <b>ASIA TIMUR</b>     |    |     |     |     |     |
| 69 | Rep.Rakyat Cina       | OH | 378 | 238 | 207 | 206 |
| 70 | Hongkong              | OH | 472 | 320 | 287 | 286 |
| 71 | Jepang                | OH | 519 | 303 | 262 | 261 |
| 72 | Korea Selatan         | OH | 421 | 326 | 297 | 296 |
| 73 | Korea Utara           | OH | 494 | 321 | 300 | 278 |
|    |                       |    |     |     |     |     |
|    | <b>ASIA SELATAN</b>   |    |     |     |     |     |
| 74 | Afganistan            | OH | 385 | 226 | 173 | 172 |
| 75 | Bangladesh            | OH | 339 | 196 | 167 | 166 |
| 76 | India                 | OH | 422 | 329 | 327 | 325 |
| 77 | Pakistan              | OH | 343 | 203 | 182 | 181 |
| 78 | Srilanka              | OH | 380 | 242 | 209 | 199 |
| 79 | Iran                  | OH | 421 | 312 | 243 | 217 |
|    |                       |    |     |     |     |     |
|    | <b>ASIA TENGAH</b>    |    |     |     |     |     |
| 80 | Uzbekistan            | OH | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 81 | Kazakhstan            | OH | 456 | 420 | 334 | 333 |
|    |                       |    |     |     |     |     |

| <b>ASIA TENGGARA</b> |                   |    |     |     |     |     |
|----------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 82                   | Philipina         | OH | 412 | 278 | 222 | 221 |
| 83                   | singapura         | OH | 530 | 363 | 279 | 276 |
| 84                   | Malaysia          | OH | 394 | 262 | 219 | 218 |
| 85                   | Thailand          | OH | 392 | 275 | 211 | 201 |
| 86                   | Myanmar           | OH | 368 | 250 | 197 | 196 |
| 87                   | Laos              | OH | 380 | 262 | 202 | 196 |
| 88                   | Vietnam           | OH | 383 | 265 | 204 | 196 |
| 89                   | Brunai Darussalam | OH | 374 | 256 | 197 | 196 |
| 90                   | Kamboja           | OH | 296 | 223 | 197 | 196 |
| 91                   | Timur Leste       | OH | 392 | 354 | 229 | 196 |
| <b>ASIA PASIFIK</b>  |                   |    |     |     |     |     |
| 92                   | Australia         | OH | 636 | 585 | 394 | 393 |
| 93                   | Selanda Baru      | OH | 451 | 308 | 278 | 276 |
| 94                   | Kaledonia Baru    | OH | 425 | 387 | 276 | 224 |
| 95                   | Papua Nugini      | OH | 520 | 476 | 319 | 259 |
| 96                   | Fiji              | OH | 363 | 329 | 221 | 179 |

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH